



LAPORAN TAHUNAN 2017

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Itjenkemenhub_151



@Itjenkemenhub_151



Itjenkemenhub_151



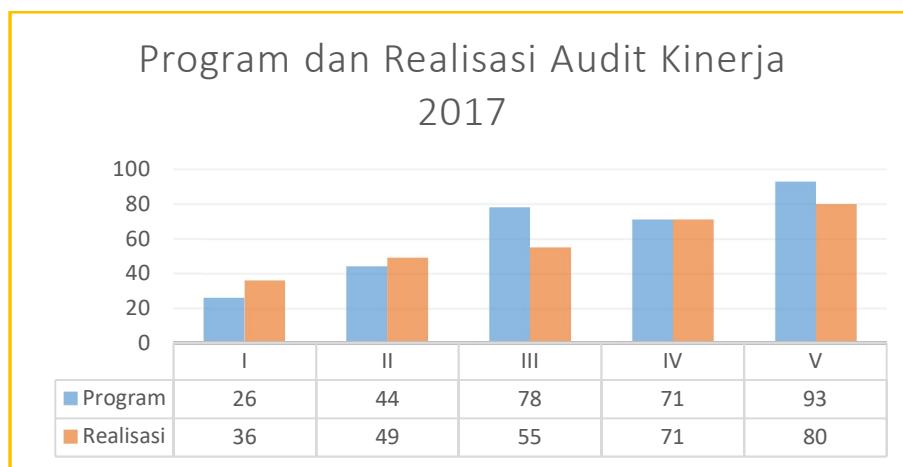
Itjen 151

1. Bidang Pengawasan Internal

A. Audit

1) Audit Kinerja dan Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tahun 2017 Inspektorat Jenderal memprogramkan kegiatan audit kinerja/audit pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 312 kegiatan, dalam realisasinya Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan 291 atau 93% kegiatan audit di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan rincian sebagai berikut:

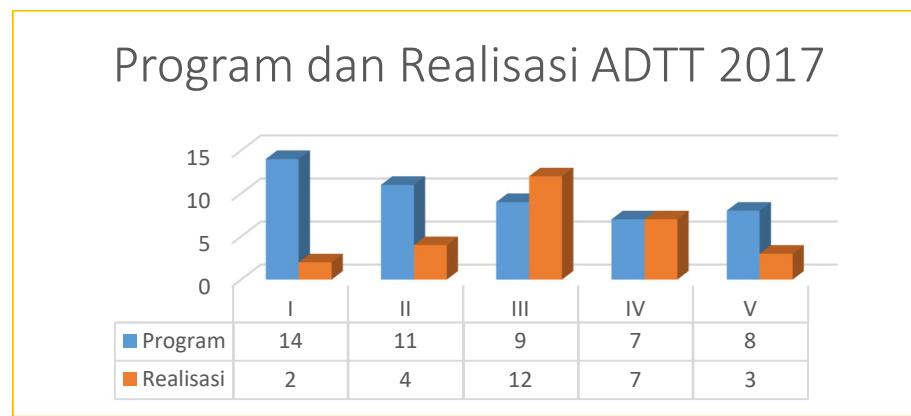


Sumber: Inspektorat Jenderal 2017

2) Audit Dengan Tujuan Tertentu

Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebanyak 44 kegiatan ADTT dari 49 kegiatan ADTT yang di programkan atau sebesar 89,7% kegiatan ADTT di lingkungan Kementerian Perhubungan, antara lain sebagai berikut: ADTT Terhadap Kewajaran Harga pada Penyelenggaran Diklat di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug, ADTT Inventarisasi Rumah Dinas di Lingkungan Kemenhub pada Biro Umum Setjen, ADTT Subsidi angkutanKA pada Dit Lalin dan Angkutan KA di privinsi DKI Jakarta, ADTT Perhitungan Ulang Vol. Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Faspel Sesayap Kab. Tanah Tidung pada UPP Kelas III Tanjung Selor, ADTT Verifikasi Perhitungan Potensi PNBP Pada PT. Semen Bosowa Indonesia atas Laporan Hasil Audit BPK-RI Tahun 2016, ADTT pada Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara di Jakarta, ADTT pada

Penerbitan Lisensi pada Sekolah Penerbangan di STPI, di Curug, Cirebon, dan Cilacap dan ADTT Verifikasi Penatausahaan Persediaan pada KSOP Tanjung Emas Semarang Terkait Tindaklanjut Pemeriksaan BPK-RI Atas LK Kemenhub Tahun 2016. Adapun rincian kegiatan ADTT di Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Sumber: Inspektorat Jenderal 2017

3) Audit Sistem Informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan

Inspektorat Jenderal pada tahun 2017 melakukan Audit Sistem Informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan kegiatan antara lain sebagai berikut: Pelaksanaan data *analytics* pada obyek pemeriksaan bulan Februari 2017 di kota Tangerang, Pelaksanaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Perhubungan bulan Maret 2017 di Jakarta dan Pelaksanaan data *analytics* pada obyek pemeriksaan bulan Oktober 2017 di kota Bogor Jawa Barat.

B. Reviu

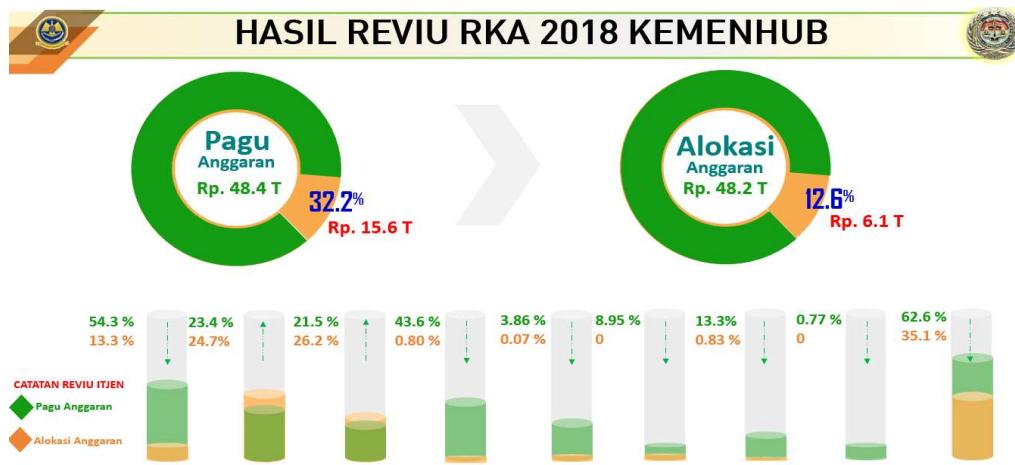
1) Reviu Laporan Keuangan

Tahun 2017, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Tahunan 2016, Triwulan I 2017, Semester I 2017, dan Triwulan III 2017 di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan rincian Kegiatan sebagai berikut: Pelaksanaan Reviu LK Tahunan BA.022 Tahun 2016, Pelaksanaan Reviu LK Tahunan BA.BUN 999.07 Tahun 2016, Pelaksanaan

Reviu LK Triwulan I Tahun 2017. Pelaksanaan Reviu LK Semester I BA.022 Tahun 2017 dan Pelaksanaan Reviu LK Triwulan III Tahun 2017.

2) Reviu RKA

Melalui reviu RKA, Inspektorat Jenderal memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa RKA di lingkungan Kementerian Perhubungan telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan dan/atau Alokasi Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perhubungan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN, standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran. Reviu RKA dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada saat penyusunan Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran, yaitu bulan Oktober dan November 2017, dengan hasil sebagai berikut:



Sumber: Inspektorat Jenderal 2017



Reviu Pagu Alokasi Anggaran tanggal 23 Oktober Tahun 2017 di Hotel Alila Jakarta

3) Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Dengan makin meningkatnya alokasi anggaran Kementerian Perhubungan, diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan belanja modal/barang dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Berdasarkan permintaan UPT, kegiatan investasi berupa belanja modal/barang yang nilainya per paket di atas Rp10 (sepuluh) Miliar, sebelum dilakukan pelelangan, HPS yang telah ditetapkan oleh PPK direviu oleh Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2017, Inspektorat Jenderal melaksanakan Reviu HPS dengan rincian sebagai berikut:

Table I
Hasil Reviu HPS 2017

Unit Kerja	kegiatan	Pagu	HPS Awal	HPS Hasil Reviu	Penghematan
Sekjen	2	447,878,292,000	393,706,084,000	383,324,347,258	10,381,736,742
Darat	15	495,902,435,000	483,347,395,787	456,305,211,434	27,042,184,352
Laut	55	1,347,100,072,000	1,028,359,063,307	826,611,195,936	76,402,832,372
Udara	57	1,348,244,468,000	1,296,582,862,241	1,249,534,347,586	47,048,514,655
Perkeretaapian	82	8,898,353,184,570	8,882,053,734,950	8,347,813,714,365	534,240,020,585
BPSDM	11	204,761,413,000	196,853,042,000	191,662,173,629	5,190,868,371

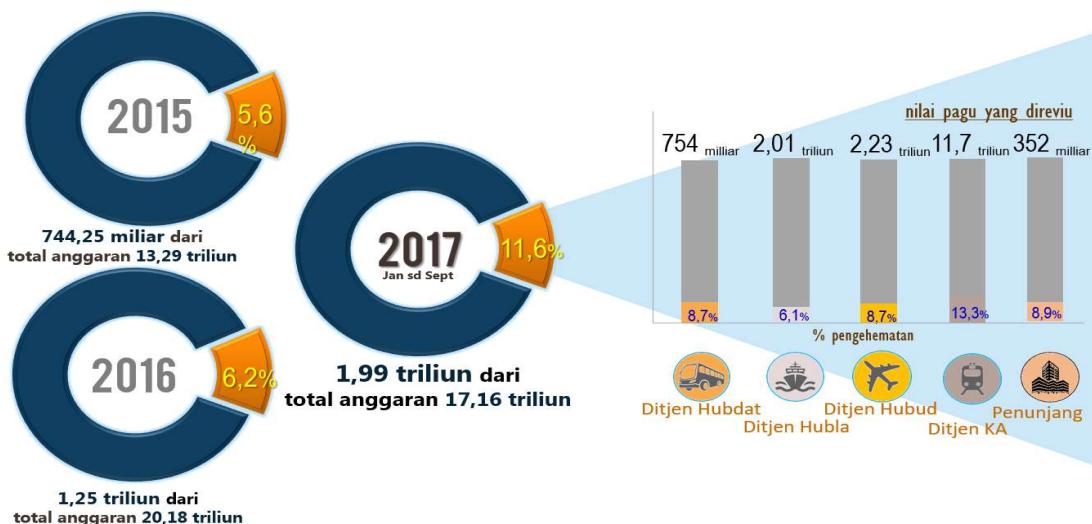
Sumber: Inspektorat Jenderal 2017



Pengarahan Irjen Pada *Entry Meeting* Reviu RKA dan HPS, di Ruang Nanggala 5 September 2017

4) Reviu Revisi Anggaran

Reviu revisi anggaran dilakukan dengan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran. Berdasarkan hasil reviu, Inspektorat Jenderal menerbitkan Pernyataan Hasil Reviu untuk dilampirkan sebagai dokumen pendukung dalam usulan revisi anggaran Pelaksanaan Reviu Revisi Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan melakukan Penelaahan dan Reviu dokumen pendukung usulan revisi DIPA. Reviu Revisi Anggaran dilaksanakan pada bulan Januari, April, Mei, September dan Oktober 2017.



5) Reviu Laporan Kinerja

Reviu Laporan Kinerja merupakan penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Reviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja di Kementerian Perhubungan serta memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas. Reviu dilaksanakan pada bulan Februari 2017, dengan hasil diterbitkannya Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan tahun 2016 dapat terlaksana dengan baik karena adanya persamaan persepsi antara Tim Reviu dengan Biro Perencanaan sebagai penyusun Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan tahun 2016.

6) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

Reviu BMN merupakan penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN yang bersifat tahunan berupa RKBMN oleh auditor APIP yang kompeten, memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN.

Rencana kebutuhan BMN meliputi :

- a. Pengadaan BMN berupa: tanah dan/atau bangunan dalam bentuk gedung kantor/rumah negara; selain tanah dan/atau bangunan yang telah ada standar barang dan standar kebutuhan (SBSK); dan
- b. Pemeliharaan BMN berupa: tanah dan/atau bangunan dalam bentuk kantor/rumah negara; selain tanah dan/atau bangunan untuk alat angkutan bermotor, BMN selain alat angkutan bermotor dengan nilai perolehan per satuan paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00. Reviu RKBMN dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober sd. 04 Nopember 2017 di Tangerang.

C. Evaluasi

1) Evaluasi Sakip

Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan Inspektorat Jenderal untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II
Evaluasi SAKIP Tahun 2016 di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Peringkat	Unit Kerja	Capaian Kinerja per Komponen (%)					
		Perencanaan (30%)	Pengukuran (25%)	Pelaporan (15%)	Evaluasi (10%)	Capaian (20%)	Total
1	Ditjen Perkeretaapian	26.49	21.25	13.62	9.08	14.95	85.39
2	Ditjen Perhubungan Udara	27.43	20.42	14.72	10.00	12.19	84.75
3	Ditjen Perhubungan Darat	29.7	23.13	10.33	9.75	10.63	83.53
4	Inspektorat Jenderal	27.69	22.19	12.73	9.75	8.69	83.3
5	BPSDM Perhubungan	25.17	24.38	10.9	6.94	15.22	82.6
6	Ditjen Perhubungan Laut	25.01	19.48	13.62	8.19	15.71	82.01
7	Badan Litbang Perhubungan	25.76	19.79	10.9	7.50	16.56	80.51
8	Sekretariat Jenderal	24.58	20.63	12.73	8.00	14.25	80.19
9	BPTJ	26.44	15.83	-	-	-	42.28

Sumber: Inspektorat Jenderal 2017

2) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan intern dalam penyelenggaran SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam rangka evaluasi SPIP, pada Tahun 2017, Inspektorat Jenderal telah melakukan :

- a) Pembahasan questioner dan langkah kerja dalam pelaksanaan Evaluasi SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b) Evaluasi SPIP pada Entitas Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian, BPSDM Perhubungan dan Badan Litbang Perhubungan;
- c) Penilaian maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) tentang rencana evaluasi/penilaian maturitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan di Ruang Mataram, tanggal 31 Oktober 2017



Entry Meeting Evaluasi Maturitas SPIP, Ruang Mataram 31 Oktober 2017



Pemenuhan level maturitas SPIP di lingkungan Kemenhub di Ruang Brawijaya,
Tanggal 1 November 2017

D. Pendampingan

Pendampingan yang dilaksanakan Tahun 2017, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pendampingan Pagu Kebutuhan

Untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan peran Inspektorat Jenderal sebagai *Quality Assurance*, pengawasan tidak hanya dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan tetapi juga dilakukan mulai proses Perencanaan. Kegiatan Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan, tidak bermasalah, dan telah dibahas di tingkat daerah melalui koordinasi antara UPT/Satker dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait. Pembahasan Pagu kebutuhan dilaksanakan secara gabungan oleh Inspektorat Jenderal dengan Biro Perencanaan yang dilaksanakan di Bogor Provinsi Jawa Barat, tanggal 13 April 2017.

2) Pendampingan Kegiatan Strategis

Pendampingan kegiatan strategis yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pendampingan pemeriksaan BPK atas kinerja pelayanan pengujian type dan registrasi uji type kendaraan bermotor pd Ditjen Hubdat dan Instansi terkait lainnya di Provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, 7 s.d 27 Agustus 2017
- b) Melaksanakan pendampingan pemeriksaan BPK atas pelaksanaan anggaran TA.2016 dan 2017 pembangunan prasarana KA LRT pada Satker pengembangan peningkatan dan perawatan prasarana KA Ditjen KA di Provinsi Sumatera Selatan, 7 s.d 27 Agustus 2017
- c) Pendampingan pemeriksaan kemajuan pekerjaan *upgrade* VTS Benoa pada Distrik Navigasi Kelas II Benoa dilaksanakan pada tanggal 13 sd 17 September 2017 dan tanggal 27 sd 29 Desember 2017. Pendampingan dilakukan dengan memeriksa laporan kemajuan pekerjaan dari Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas beserta dokumen pendukung lainnya;

- d) Pendampingan pemeriksaan BPK-RI atas Kinerja Pengelolaan Konsesi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Propinsi DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan, pada tanggal 07 Agustus sd. 27 Agustus 2017;
- e) Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Sulawesi Utara dalam rangka peninjauan insfrastruktur dan transportasi ke Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara pada tanggal 13 sd. 17 September 2017.
- f)

E. Konsultasi

Konsultasi adalah memberikan suatu petunjuk, pertimbangan, pendapat atau nasehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, guna mendapat rekomendasi atau alternatif pemecahan masalah dari Inspektorat Jenderal. Konsultasi yang telah dilakukan pada tahun 2017 antara lain sebagai berikut: Melaksanakan asistensi/konsultasi dibidang pengawasan (*Quality Assurance*) dengan Balai Teknik Penerbangan tentang kegiatan operasional, dan Mediasi terkait dengan kekurangan pembayaran kegiatan subsidi angkutan udara perintis TA. 2016 bersama Direktur Angkutan Udara, tanggal 11 Oktober 2017

F. Pemantauan

1) Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal

Monitoring dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit dilaksanakan dengan aktif melalui program pemantauan langsung kepada



Auditi yang telah melewati batas waktu pelaksanaan tindak lanjut (2 bulan setelah tanggal SPT Inspektorat Jenderal).

Sumber: Inspektorat Jenderal 2017

Posisi s.d Desember 2017 dari hasil audit Inspektorat Jenderal pada UPT dan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan pada tahun 2017 terdapat sebanyak 1433 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 513 temuan, dalam proses sebanyak 593 temuan, dan sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 327 temuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun 2017

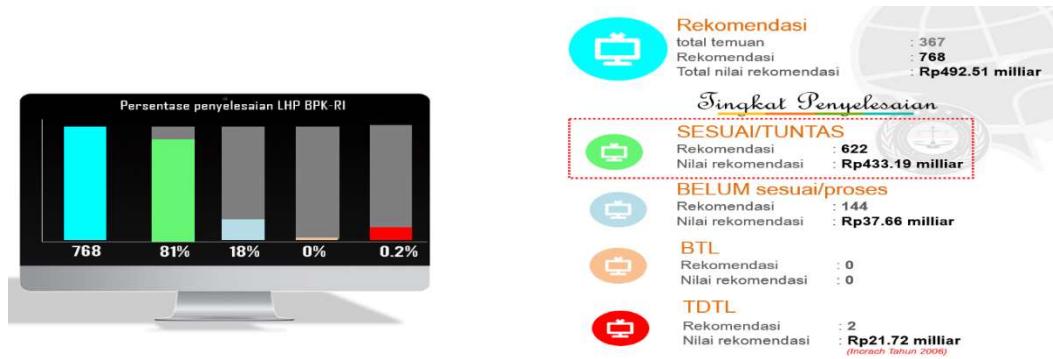
Unit Kerja	Temuan	Tuntas	Proses	Belum TL	TDTL
Sekjen	0	0	0	0	0
ITJEN	0	0	0	0	0
Darat	112	73	26	13	0
Laut	729	218	308	203	0
Udara	404	114	225	65	0
Perkeretaapian	53	11	4	38	0
BPSDM	109	82	20	7	0
LITBANG	19	15	3	1	0
BPTJ	7	0	7	0	0
JUMLAH	1.433	513	593	327	0

Sumber: Inspektorat Jenderal 2017

2) Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI)

Hasil pemeriksaan BPK-RI posisi s.d 31 Desember 2017 di lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat 768 rekomendasi, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sebanyak 622 rekomendasi, sedangkan 144 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum

dinyatakan selesai, serta 0 rekomendasi belum ditindaklanjuti dan 2 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.



Sumber: Inspektorat Jenderal 2017

G. Kegiatan Pengawasan Lainnya

1) Pembinaan Pengawasan

Kegiatan Pembinaan Pengawasan bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada UPT yang telah menunjukkan kinerja terbaik dengan mengutamakan prinsip 3E+ 1K (Efektif, Efisien, Ekonomis dan Ketaatan). Kegiatan ini merupakan upaya Inspektorat Jenderal untuk merubah paradigma yang selama ini terkesan sebagai *watchdog* menjadi konsultan dan *quality assurance*.



Sumber : Inspektorat Jenderal 2017

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan Tim Terpadu dari Inspektorat Jenderal (Itjen), Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Perlengkapan, Biro Kepegawaian dan Organisasi serta Biro Hukum, menurut Irjen Kemenhub, secara umum seluruh unit kerja telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, namun terdapat beberapa

hal penting yang belum optimal dan perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan tata kelola. Penghargaan Unit Kerja Terbaik dan pelayanan sebagaimana agenda *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Diantaranya adalah dalam hal menyusun rencana aksi *Road Map Zona Integritas* setiap tahunnya, menyusun kebijakan terkait benturan kepentingan dan melaporkannya secara periodik, menyusun proses bisnis terhadap seluruh SOP yang telah ditetapkan, dan meningkatkan penggunaan tata kelola dari sisi elektronik yang sudah ada seperti Email/Surat Elektronik kedinasan dan Pelaksanaan surat secara elektronik. Di bawah ini adalah peringkat UPT dengan Kinerja Terbaik Tahun 2017 :



Sumber : Inspektorat Jenderal 2017



Penyerahan UPT terbaik oleh Menteri Perhubungan pada acara Hari Perhubungan Nasional, Jakarta 18 September 2017



Penyerahan trophy UPT terbaik kedua dan ketiga diserahkan oleh Inspektur Jenderal, Jakarta 18 September 2017

2) Sistem Manajemen Pengaduan (SIMADU)

Dalam rangka lebih mengoptimalkan sistem pengaduan (*whistleblowing system*), Inspektorat Jenderal menyiapkan aplikasi pengaduan yang diberi



WBS SYSTEM
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pelapor tidak perlu **KHAWATIR** terungkapnya identitas karena setiap pelapor akan mendapat register pengaduan untuk dapat memonitor progress pengaduannya

nama “**SIMADU**” atau **S**istem **M**Anajemen Penga**D**Uan. SIMADU adalah aplikasi yang disediakan dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai/masyarakat dalam pencegahan pelanggaran dan penyimpangan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Aplikasi SIMADU merupakan adopsi dari aplikasi wise Kementerian Keuangan. Aplikasi dapat diakses melalui <http://simadu.dephub.go.id>. Saat ini Inspektorat Jenderal telah melakukan penyempurnaan SOP dan SK Pokja Pelaksana SIMADU, serta sosialisasi baik internal di lingkungan Inspektorat Jenderal ataupun eksternal di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain, melakukan sosialisasi ke UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan, TOT Aplikasi SIMADU di lingkungan Inspektorat Jenderal, serta ikut serta sebagai narasumber dalam kegiatan Bimbingan dan Bantuan Teknis Aplikasi WISE oleh Pusdatin.

3) Evaluasi Pengawasan

Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program kerja dan kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2017, dilakukan evaluasi kegiatan per triwulan, Rapat Dinas dan Rakornis di Lingkungan Inspektorat Jenderal di Hotel Golden Jakarta, 21 s.d 22 Desember 2017



Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2017



Rakornis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2017, ciwidey,
9 November 2017

4) Pengaduan Masyarakat

Tahun 2017, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melayani 406 pengaduan masyarakat, dimana pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui, dimana perbuatan tersebut dilakukan, kapan perbuatan tersebut dilakukan, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut, dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.



Pengaduan Masyarakat Yang Masuk Ke Kementerian Perhubungan

5) Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan *Whistleblowing System Sosialisasi*

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.312 Tahun 2016 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) maka Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Sosialisasi UPG, *Whistleblowing System* dan Benturan Kepentingan pada UPG Kementerian Perhubungan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru terbentuk secara resmi pada 12 Mei 2017. Sesuai dengan KP.312 tahun 2016, telah terbentuk sebanyak 29 UPG Kementerian Perhubungan. Salah satunya pada wilayah Kalimantan Barat yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak. Sosialisasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan UPG, *Whistleblowing* serta Benturan Kepentingan demi mewujudkan *Clean and Good Governance*, pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.



Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Itjen Kemenhub di Yogyakarta, 12 Mei 2017



Rapat Koordinasi Unit Pengendalian Gratifikasi Kemenhub, Tangerang 28 s.d 30 November 2017

6) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Komitmen Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bebas korupsi terus digalakkan. Salah satunya menjadikan wilayah kerjanya bebas korupsi. Sebelum masuk sebagai nominator, mereka telah berhasil pada Pemilihan Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik pada tahun sebelumnya. Penilaian unit kerja dengan kinerja terbaik telah dilakukan sejak tahun 2012 sejak ditandatangani piagam Zona Integritas antara Menteri Perhubungan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Tahapan Penilaian Itjen Kemenhub Sebelum Nominasi WBK Ditetapkan tahun 2010 sd 2025. Perpres ini juga merupakan mandat dari Undang-undang 17 tahun 2007 tentang RPJMN tahun 2005 sd 2025. Perpres 81 tahun 2010 ditetapkan sebagai panduan pelaksanaan RB di seluruh Instansi pemerintah dan memberikan mandat kepada Kementerian PAN dan RB untuk menyusun

Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025 yang dibagi menjadi 4 tahap (per-5 tahunan) sampai dengan tahun 2025. Adapun penilaianya melalui 6 tahapan, yaitu:

- 1) Rendahnya temuan strategis dan kecepatan audit menindaklanjuti rekomendasi hasil audit/pemeriksaan sehingga didapatkan daftar panjang nominasi
- 2) Daftar panjang nominasi dirapatkan dalam Rapat Majajemen Itjen dengan mendegarkan pendapat para Manajemen dan Auditor Senior, kemudian disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan SDM yang ada di Itjen hingga diperoleh daftar pendek nominasi.
- 3) Dilakukan peninjauan lapangan dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi(LKE) sesuai PERMENPAN 52/2014 yang disesuaikan, kategori penilaian dan penetapan pemenang dilakukan dengan mekanisme kesetaraan (apple to apple).
- 4) Para pemenang unit kerja dengan kinerja terbaik akan diberikan penghargaan padaacara Hari Perhubungan Nasional setiap 17 September setiap tahunnya.
- 5) Para pemenang Unit Kerja terbaik dilakukan peninjauan kembali dengan menggunakan LKE 52/2014 seutuhnya dan dilakukan Rangking berdasarkan nilai tertinggi dari pemenuhan elemen yang ada.
- 6) Kemenhub mengirim nominasinya kepada Menteri PAN dan RB untuk di evaluasi menuju predikat WBK.



Sosialisasi persiapan dari MENPAN RB dalam penilaian oleh tim penilaian nasional WBK, 27 April 2017 di Ruang Rapat Sesltjen



Aktivasi pelaksanaan persuratan secara elektronik (**e-office**)
bagi para nominasi WBK 2017, 2 Maret 2017



Kunjungan Deputi Pengawasan Dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB ke Politeknik Pelayaran
Surabaya (Nominasi WBK 2017), 9 s.d 10 November 2017

- 7) **Meninjau Posko Angkutan Lebaran Terpadu di Bandara halimIrjen**
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Dr. Wahju Satrio Utomo dan Ketua
STPI Curug Capt. Novyanto Widadi, S.AP, MM meninjau Posko Angkutan
Lebaran Terpadu di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu
tanggal 21 Juni 2017.



- 8) **Menghadiri Rapat Koordinasi Angkutan Lebaran di Provinsi Jawa Timur**

Inspektur Jenderal, pada tanggal 13 Juni 2017 memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran (Angleb) Terpadu 2017 Provinsi Jawa Timur, dalam pengarahannya, Inspektur Jenderal menegaskan bahwa keselamatan transportasi harus diutamakan dan diwujudkan tanpa alasan apapun.



9) Melakukan pemantauan arus balik Lebaran 2017 melalui jalur udara

Pemantauan dilakukan pada tanggal 2 Juli 2017 dengan menggunakan pesawat helikopter milik STPI Curug. Pesawat terbang *take off* dari Bandara Budiarto Curug dan terus menyusuri jalur pantai utara (pantura) Jawa Barat sampai ke Gerbang Tol Brexit menuju Jakarta.



10) Irjen Kementerian Perhubungan tinjau pembangunan kapal latih BPSDM Perhubungan di PT Steadfast Marine Pontianak, Kalimantan Barat

Dari peninjauan di lapangan pada tanggal 14 Juni 2017, pembangunan enam kapal latih taruna sesuai rencana (*on the track*). Pihak kontraktor yang membangun kapal latih berkomitmen menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Dari enam kapal latih pesanan BPSDM Perhubungan dibagi menjadi tiga paket masing-masing dua kapal. Pertama paket STIP dan BP2IP Malahayati Aceh, kedua Paket Poltekpel-BPPP Minahasa Selatan dan



paket ketiga, Paket PIP Makassar dan BP2IP Sorong.

11) Inspektur Jenderal Tinjau Pengembangan Bandara Morotai

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo (Tommy) bersama Inspektur V Heri Sudarmaji meninjau pengembangan Bandara Morotai, Maluku Utara, pada tanggal 6 Oktober 2017. Dalam tinjauannya, didampingi juga oleh Kepala UPBU Kelas III Morotai Syamsuddin Soleman, Irjen menyambangi Kantor UPBU Morotai, melihat soft drawing terminal dan gambar pekerjaan lapisan /peningkatan *Pavement Classification Number* (PCN) serta masterplan Bandara.



12) Irjen Kemenhub Tinjau Bandara Sultan Babullah

Irjen Kementerian Perhubungan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Ternate, Maluku Utara pada tanggal 6 Oktober 2017. Dalam kegiatannya, salah satunya meninjau Bandara Sultan Babullah. Saat ini bandara tengah dilaksanakan proyek renovasi terminal penumpang dengan nilai anggaran Rp 8 miliar dan Bandara Sultan Babullah masuk sebagai salah satu proyek strategis nasional. Inspektur Jenderal didampingi oleh Inspektur V Heri Sudarmaji dalam rangkaian kunker. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sultan Babullah Ternate Saeful Bahri menyampaikan kesiapan renovasi tersebut, selain itu Inspektur Jenderal juga meninjau

setiap sudut lokasi bandara dan melihat langsung proses perkembangan pekerjaan yang ada.



H. Kegiatan Pendukung

1) Buletin Transparansi

Selama tahun 2017, Inspektorat Jenderal telah membuat buletin Transparansi sebanyak empat edisi yang terbit tiga bulan sekali, ada pun judul disetiap edisinya sebagai berikut :

a) Edisi 1

Bulletin transparansi edisi 1 diantaranya berisi tentang: Kolom Irjen yang memuat artikel tentang “Kementerian Perhubungan Segera Susun Formula Perhitungan Tarif Subsidi”.



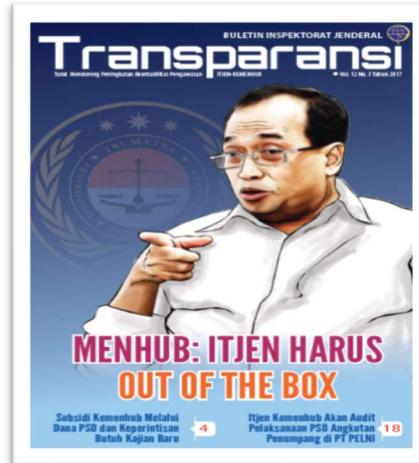
b) Edisi 2

Bulletin transparansi edisi 2 diantaranya berisi tentang: Opini yang memuat artikel tentang “Saatnya Lembaga Diklat Kemenhub Terapkan Pendidikan Integritas”.



c) Edisi 3

Bulletin transparansi edisi 3 diantaranya berisi tentang: kolom auditor yang memuat artikel tentang “Kondisi Rill dan Tantangan Angkutan Laut Kelas Ekonomi & Perintis di Indonesia”.



d) Edisi 4

Bulletin transparansi edisi 4 diantaranya berisi tentang: Reviu yang memuat artikel tentang “Mengawal Pemerataan Infrastruktur dan Pertumbuhan Investasi Transportasi 2018”.



2) *Family gathering* di Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Family gathering merupakan media komunikasi yang diharapkan dapat meningkatkan hubungan yang lebih baik diantara pegawai, antara atasan dengan bawahan, bahkan diantara keluarga pegawai, agar terbentuk tim kerja yang luar biasa solid dengan berdasarkan kekeluargaan. *Family*



gathering dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2017 yang bertempat di Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

3) Studi Banding ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Itjen Kemenhub) melaksanakan kunjungan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) untuk studi banding penggunaan aplikasi *Audit Management System* yang dipergunakan di lingkungan Kementerian Keuangan pada Kamis 30 Maret 2017 di Gedung Djuanda II lantai 7 Kementerian Keuangan. Delegasi Itjen Kemenhub dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Bambang Sudaryono, beserta perwakilan Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Auditor di lingkungan Itjen Kemenhub. Acara dibuka oleh Sekretaris Itjen Kemenkeu, Drs. Sofandi Arifin, Ak., MPA., CFE. Turut hadir dalam acara studi banding adalah Inspektur VII, Robert Gonijaya, Ak., MSF., CIA, CISA dan pegawai di lingkungan Itjen Kemenkeu.



Studi Banding ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Jakarta 30 Maret 2017

4) Studi Banding ke BPK-RI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Itjen Kemenhub) melakukan Studi Banding kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang bertempat di menara 7 lantai 2 pada hari Kamis, 16 Maret 2017. Adapun Studi Banding kali ini adalah tentang Aplikasi Audit

Manajemen Sistem. Hadir pada Studi Banding tersebut adalah Kepala Biro Teknologi Informasi Ria Anugriani Kepala Bagian Manajemen Kinerja TI dan Dukungan Pemeriksaan Rudi Hermawan, Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi Novis Pramantya Budi dan Kepala Bagian Operasional TI Iwan AW beserta Eselon IV dan staff di lingkungan BPK-RI. Sedangkan dari Itjen Kemenhub yang hadir adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal Bambang Sudaryono beserta Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian, Perwakilan Auditor di lingkungan Itjen Kemenhub. Disampaikan Kabiro bahwa Biro TI bertugas melakukan dan menjalankan konsep Tata Kelola SDM Teknologi Informasi di BPK-RI. Biro TI juga telah memiliki tata kelola secara organisasi, Grand Design dan Road Map IT yang dijalankan oleh 60 pegawai di lingkungan Biro TI.



Studi Banding ke BPK RI, Jakarta 16 Maret 2017

5) Penghargaan dari KPPN

Penghargaan oleh KPPN wilayah IV kepada ITJEN sebagai peringkat 2 terbaik dalam pelaksanaan rekonsiliasi data eksternal penyampaian LPJ Bendahara, Revolving Uang Persediaan, Penyampaian Saldon Rekening dan Pendaftaran Kontrak secara tepat waktu serta penyerapan anggaran sesuai jadwal.



6) Meraih ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan kembali menerima ISO Sistem Manajemen Mutu. Bila sebelumnya ISO 9001: 2008, meningkat menjadi 9001:2015, dari lembaga Sertifikasi Tuv Nord. Peraihan ini dapat menjadipemicu untuk terus meningkatkan kualitas Itjen. Penerimaan Sertifikat ISO 9001:2015, berdasarkan Hasil Audit lembaga Sertifikasi Tuv Nord Indonesia dengan Nomor : 1-F15088/2017 pada 17 Mei 2017 dengan Nomor Sertifikat 16.00F.15088 yang berlaku sampai dengan 9 Juni 2018. Sebanyak 25 Prosedur Mutu telah berhasil ditingkatkan menjadi ISO 9001:2015. Perbedaan serifikat ISO 9001:2008 dengan ISO yang diraih saat ini yaitu ISO 9001:2015 adalah pemenuhan terhadap prosedur mutu yang ada, menggunakan Analisa Risiko, Analisa SWOT, dan memerhatikan isu-isu strategis di Internal dan eksternal.



Penyerahan sertifikat ISO 9001:2015 pada acara Apel Besar Inspektorat Jenderal di Ruang Mataram, Kementerian Perhubungan Tanggal 5 Juni 2017